

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Politik Keekerabatan Dalam Pemerintah Gampong Blang Riek Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, politik keekerabatan yang pertama kali terlihat di Gampong Blang Riek adalah saat sebelum Geuchik Gampong Blang Riek saat ini menjabat, ayah beliau juga menjabat sebagai Geuchik di periode sebelumnya. Politik keekerabatan atau politik keekerabatan diartikan secara sederhana sebagai sejumlah kecil keluarga mendominasi distribusi kekuasaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Politik keekerabatan yang terjadi di Gampong Blang Riek disebabkan oleh kondisi khusus pada saat itu. Kepemimpinan ayah bapak Rizal telah membawa pengaruh terhadap praktik politik keekerabatan yang berlanjut hingga saat Geuchik. Dalam mencari pengganti untuk mengisi jabatan yang kosong, banyak warga yang menolak karena alasan tidak siap atau sibuk. Hal ini membuat Geuchik cenderung menunjuk kerabatnya sendiri untuk mengisi posisi tersebut. Meskipun Geuchik awalnya mendahulukan warga non kerabat, namun kondisi yang sulit membuatnya akhirnya beralih kepada kerabatnya. Adapun dampak dari adanya politik keekerabatan yang terjadi di Gampong Blang Riek adalah dampak negatif seperti politik keekerabatan di Gampong Blang Riek menyebabkan kurangnya transparansi dalam pemerintahan, menciptakan rasa ketidakpercayaan di antara warga terhadap tindakan pemerintah setempat, menghambat peluang lahirnya individu yang berkualitas, karena posisi pemerintahan lebih cenderung diisi oleh anggota keluarga yang terlibat, menyebabkan polarisasi politik di mana sulit untuk menerima kritik atau pandangan alternatif terhadap pemerintahan gampong, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan karena akses ke peluang dan sumber daya cenderung sulit bagi mereka yang bukan bagian dari keluarga penguasa. Sedangkan dampak positifnya adalah transfer nilai dan etika antar keluarga sehingga menciptakan landasan etika dan moral yang konsisten dalam pemerintahan gampong.

Kata Kunci : Politik Keekerabatan, Pemerintah Gampong

ABSTRACT

This thesis examines the Politics of Kinship in the Government of Gampong Blang Riek, Kuta Makmur District, North Aceh Regency, the first kinship politics seen in Gampong Blang Riek was before the current Geuchik Gampong Blang Riek was in office, his father also served as Geuchik in the previous period. Kinship politics or kinship politics is simply defined as a small number of families dominating the distribution of power. The method used in this study is a descriptive qualitative method, with data collection methods through observation, interviews and documentation. The result of this study is that the kinship politics that occurred in Gampong Blang Riek was caused by special conditions at that time. The leadership of Rizal's father has brought influence to the practice of kinship politics that continues until the time of Geuchik. In looking for a replacement to fill the vacant position, many residents refuse because they are not ready or busy. This makes Geuchik tend to appoint his own relatives to fill the position. Although Geuchik initially prioritized non-relatives, the difficult conditions made him finally turn to his relatives. The impact of kinship politics that occurs in Gampong Blang Riek is a negative impact such as kinship politics in Gampong Blang Riek causes a lack of transparency in government, creates a sense of distrust among citizens towards the actions of the local government, hinders the chances of the birth of qualified individuals, because government positions are more likely to be filled by the family members involved, causing political polarization where it is difficult to accept criticism or alternative views of gampong government, and create inequality in competition because access to opportunities and resources tends to be difficult for those who are not part of the ruling family. Meanwhile, the positive impact is the transfer of values and ethics between families so as to create a consistent ethical and moral foundation in the gampong government.

Keywords: Kinship Politics, Gampong Government